



PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR)

S. Wahyuningsih, M.N Mukmin, Y.P Hutomo

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeristas Djuanda, Bogor, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien dan bertanggung jawab. Model penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan quota sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan Analisis Linier Berganda dengan SPSS Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Bogor, dengan koefisien determinasi sebesar 47,6%, sedangkan 52,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, BPKAD Kabupaten Bogor.

PENDAHULUAN

Good governance atau pemerintahan yang baik mengacu pada keberhasilan dalam menjalankan tugas negara sesuai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan sumber daya,

terutama keuangan, adalah kunci dalam pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah harus mengelola keuangan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, dalam era desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah yang

*Correspondence Address : sekarwahyuningsih13@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024.4743-4751

© 2024UM-Tapsel Press

akuntabel menjadi krusial untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2004 mengatur otonomi daerah, yang memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Walaupun pemerintah daerah memiliki kewenangan luas, mereka tetap harus mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pertanggungjawaban keuangan daerah mengalami perubahan signifikan. Sistem laporan keuangan yang baru mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, menggantikan sistem lama seperti Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang memiliki kekuatan hukum.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bogor. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ingin meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kinerja tatakelola pemerintahan yang baik terutama pada pengelolaan keuangan dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipasi, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu tertatanya administrasi dan

pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah.

Tabel 1. Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD di Jawa Barat Tahun 2017-2021

No.	Entitas Pemda	Opini Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
4.	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : www.jabar.bpk.go.id. Data diolah, 2022.

Berdasarkan data opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tabel 1 tersebut, Kabupaten Bogor mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2021 berubah menjadi Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Masalah yang ditemukan mencakup pengelolaan retribusi dan penerimaan yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga dalam menentukan pengelolaan keuangan daerah BPKAD Kabupaten Bogor belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan belum adanya pemahaman yang mendalam dari aparaturnya mengenai perencanaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan daerah.

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang akurat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, transparan, dan akuntabel guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Defitri, 2018). Darma (2019), Pramudita (2017), Lamba (2020) memberikan hasil standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) menunjukkan hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Namun, penelitian Sukmawati (2019) menunjukkan hasil bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan mengajukan judul "**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor)**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Aman No.1, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat. Desain penelitian menggunakan metode survei deskriptif dengan teknik *explanatory* untuk menjelaskan hubungan antar variabel Sugiyono (2017). Penelitian ini melibatkan 50 pegawai BPKAD yang dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *quota sampling* dengan kriteria tertentu, seperti pegawai yang bekerja di bagian terkait dan memiliki masa jabatan minimal satu tahun, dari total populasi 85 orang. Variabel penelitian mencakup variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Transparansi (X2), serta variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y). Data primer dikumpulkan

menggunakan kuisioner, studi pustaka, dan dokumentasi.

Dalam pengujian instrumen, Uji Validitas yang digunakan untuk mengukur ketepatan alat ukur dalam mencerminkan data yang sesungguhnya, dengan item dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor item dan skor total minimal 0,3; nilai di bawah 0,3 menunjukkan item tidak valid. Lalu Uji Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengukuran, diuji dengan koefisien *Cronbach's Alpha*, dengan nilai $\geq 0,6$ menunjukkan reliabilitas yang baik (Sugiyono, 2017). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji asumsi klasik dengan memastikan model regresi memenuhi beberapa syarat (Ghozali, 2016) : normalitas, yang diuji menggunakan grafik atau metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikan $> 0,05$ menunjukkan distribusi data normal; multikolinieritas, diukur dengan VIF dan *Tolerance*, di mana *Tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$ menunjukkan tidak adanya multikolinieritas; dan heteroskedastisitas, diuji dengan melihat pola pada grafik *scatterplot* antara residual dan nilai prediksi, di mana tidak adanya pola tertentu menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 20.0, dengan model regresi linier berganda jika ada lebih dari satu variabel independen Chandarin (2017), menggunakan model

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon.$$

Uji hipotesis melibatkan uji simultan (F-Test) untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersamaan, di mana $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ menunjukkan penerimaan hipotesis alternatif, dan uji parsial (T-Test) untuk menilai pengaruh variabel independen secara individual, dengan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ menunjukkan penerimaan hipotesis alternatif. Uji hipotesis dilakukan dengan

uji dua pihak untuk menguji pengaruh variabel tanpa arah yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) Transparansi (X2) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y), dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah

Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,744	0,3	VALID
2	0,698	0,3	VALID
3	0,732	0,3	VALID
4	0,723	0,3	VALID
5	0,410	0,3	VALID
6	0,541	0,3	VALID
7	0,677	0,3	VALID
8	0,619	0,3	VALID
9	0,744	0,3	VALID
10	0,662	0,3	VALID

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa hasil pengujian validitas standar akuntansi pemerintah menunjukkan seluruh butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena r_{hitung} masing-masing pernyataan dalam kuesioner lebih besar dari r_{tabel}. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghazali (2016) yang menyatakan bahwa, suatu instrument dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r_{hitung} > r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Transparansi

Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,541	0,3	VALID
2	0,619	0,3	VALID
3	0,723	0,3	VALID
4	0,648	0,3	VALID
5	0,707	0,3	VALID
6	0,658	0,3	VALID
7	0,524	0,3	VALID
8	0,644	0,3	VALID

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa hasil pengujian validitas transparansi menunjukkan seluruh butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena r_{hitung} masing-masing pernyataan dalam kuesioner lebih besar dari r_{tabel}. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghazali (2016) yang menyatakan bahwa, suatu instrument

dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r_{hitung} > r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,819	0,3	VALID
2	0,780	0,3	VALID
3	0,738	0,3	VALID
4	0,812	0,3	VALID
5	0,828	0,3	VALID
6	0,758	0,3	VALID
7	0,732	0,3	VALID
8	0,811	0,3	VALID
9	0,705	0,3	VALID

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, diketahui bahwa hasil pengujian validitas transparansi menunjukkan seluruh butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena r_{hitung} masing-masing pernyataan dalam kuesioner lebih besar dari r_{tabel}. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghazali (2016) yang menyatakan bahwa, suatu instrument dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r_{hitung} > r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%.

2. Uji Reliabilitas

Berikut merupakan hasil pengujian reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	r _{kritis}	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,854	0,6	Reliabel
Transparansi	0,790	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,917	0,6	Reliabel

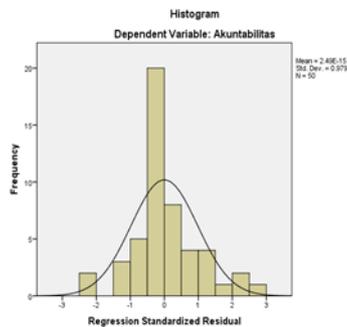
Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai tersebut ditentukan nilai standar r_{kritis} adalah sebesar 0,6 hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diuraikan oleh Sugiyono (2016) yang menjelaskan bahwa suatu instrument dinyatakan reliabel bila koefisien lebih dari atau sama dengan 0,6. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,854, Transparansi sebesar 0,790 dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

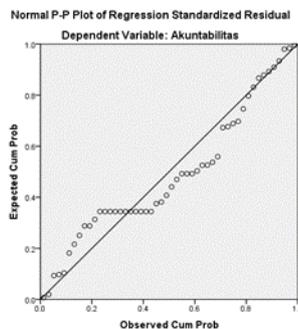
sebesar 0,917, ini menyatakan bahwa k-3 variabel tersebut memiliki nilai lebih dari 0,6 sehingga semua instrumen yang digunakan reliabel dan layak digunakan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 1. Grafik Histogram



Gambar 2. Grafik P Plot

Sumber : *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Tabel 6. One Sample

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.35427878
	Absolute	.148
Most Extreme Differences	Positive	.148
	Negative	-.132
Kolmogorov-Smirnov Z		1.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.227

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Kolmogorov Smirnov Test

Berdasarkan Gambar 1. Terlihat bahwa grafik histogram memiliki distribusi data yang mengikuti kurva bentuk lonceng. Lalu, pada Gambar 2. Menampilkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Selain itu, pada tabel 6. Menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Sehingga

modal regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk dilakuka uji regresi.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 7. Hasil Uji

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.705	1.419
	Transparansi (X2)	.705	1.419

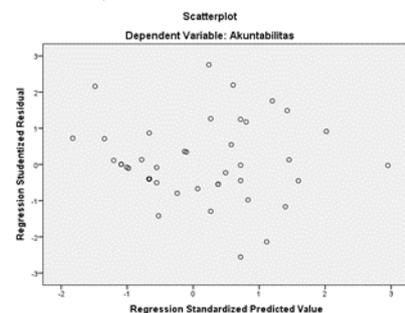
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Sumber : *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Multikolonieritas

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai VIF 1,419 dengan nilai tolerance sebesar 0,705, variabel Transparansi memiliki nilai VIF 1,419 dengan nilai tolerance sebesar 0,705. Karena kedua variabel tersebut memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas atau non multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Sumber : *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Berdasarkan gambar 3 tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi variabel

terikat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berdasarkan masukan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Transparansi.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.467	5.224		.855	.397
1 Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.254	.123	.260	2.067	.044
Transparansi (X2)	.698	.171	.513	4.081	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)
 Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 8 tersebut, dapat diketahui bahwa nilai dari model persamaan regresi yaitu sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon$$

$$Y = 4,467 + 0,254X_1 + 0,698X_2 + \epsilon$$

Interprestasi dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Hasil model persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 4,467, nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dan Transparansi bernilai 0, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan bernilai 4,467 satuan atau nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tetap.

b. Hasil model persamaan regresi untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,254. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar satu satuan, maka menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebesar 0,254 satuan.

c. Hasil model persamaan regresi untuk variabel Transparansi sebesar 0,698 Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Transparansi sebesar satu satuan, maka menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebesar 0,698

5. Koefisien Korelasi Berganda

Tabel 9. Koefisien Korelasi Berganda

Model	Model Summary			Std. Error of the Estimate
	R	R Square	Adjusted R Square	
1	.690 ^a	.476	.454	2.404

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Standar Akuntansi Pemerintah (X1)
 Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

Berdasarkan Tabel 9 tersebut, diperoleh nilai R sebesar 0,690 berarti bahwa nilai R (0,690) tersebut berada pada interval nilai R (0,601-0,800) dengan derajat kekuatan hubungan yang kuat, sehingga terdapat pengaruh yang kuat antara variabel Standar Akuntansi Pemerintah dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Selain itu berdasarkan Tabel 9 tersebut diperoleh angka R² (R Square) sebesar 0,476 atau 47,6%. Hal ini menunjukkan kontribusi Standar Akuntansi Pemerintah dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebesar 47,6%, sedangkan sisanya 52,4% dipengaruhi atau di jelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian ini.

6. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Tabel 10. Hasil Uji F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	246.731	2	123.366	21.349	.000 ^b
Residual	271.589	47	5.778		
Total	518.320	49			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Standar Akuntansi Pemerintah(X1)

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

b. Uji T

Tabel 11. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.467	5.224		.855	.397
1 Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.254	.123	.260	2.067	.044
Transparansi (X2)	.698	.171	.513	4.081	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)
 Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS versi 20, 2022

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah dipeoleh nilai T_{hitung} sebesar 2,067 sedangkan nilai untuk T_{tabel} sebesar 2,011. Sesuai dengan hasil Uji T (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y) adalah $0,044 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} $2,067 >$ nilai T_{tabel} 2,011, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hal ini menunjukan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah ini menunjukkan bahwa semakin baiknya tingkat standar akuntansi pemerintah maka semakin baik pula tingkat keberhasilan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Sebagai contoh Standar Akuntansi Pemerintah digunakan sebagai pedoman menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya mengenai keuangan dan seluruh data transaksi. Dengan melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas kekayaan dan operasional pemerintah daerah agar setiap kegiatan dan keputusan yang ditetapkan dilakukan secara jujur dan terhindar dari penyalahgunaan jabatan. Dan pelaksanaan anggaran berupa laporan realisasi anggaran penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Pengaruh Transparansi secara parsial terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Transparansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,081 sedangkan nilai untuk T_{tabel} sebesar 2,011. Sesuai dengan hasil Uji T (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Transparansi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} $4,081 >$ nilai T_{tabel} 2,011, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hal ini menunjukan Transparansi secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor. Pengaruh Transparansi ini menunjukkan bahwa semakin baiknya tingkat transparansi maka semakin baik pula tingkat keberhasilan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Sebagai contoh dengan adanya informasi tentang Keuangan dan Aset Daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya agar pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah telah dilakukan dengan tepat waktu dan pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku.

3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Transparansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil Uji F (simultan), diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 21.349 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 3,19. Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21.349 > 3,19$) dengan nilai

signifikansi F sebesar sebesar 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi tersebut bermakna bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas kekayaan dan operasional pemerintah daerah, pengumuman Keuangan dan Aset Daerah baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan. Kemudian Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagai sarana publik, laporan keuangan pemerintah berfungsi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan akuntabilitas pengelola keuangan terhadap publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai media transparansi kepada publik dengan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan transparansi terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Bogor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP dan

semakin tinggi tingkat transparansi, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Bogor juga akan meningkat. Oleh karena itu, disarankan agar BPKAD Kabupaten Bogor terus meningkatkan penerapan SAP dan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 2021. *Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD di Jawa Barat Tahun 2017-2021*. www.jabar.bpk.go.id. Diakses 2022.

Chandarin, G. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Darma, D. A. 2019. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik. Vol. 9 No.2. ISSN: 2087 – 466.

Defitri, S. Y. 2018. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Benefita Vol. 3 No. 1, Hal 64-75. ISSN 2477-7862.

Donaldson, L., & Davis, J.H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management. Vol. 16 No. 1. Hal 49-64. ISSN : 0312-8962.

Fakhrurazik, A. 2010. *Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit : Andi Publisher. Yogyakarta.

Ghozali, I., 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Kusumastuti, L. 2014. *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Penerbit : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lamba, A.D. 2020. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Value Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Palopo (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)*. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo.

Mardiasmo. 2012. *Keuangan Daerah : Pengelolaan, Pelaporan, dan Akuntabilitas*. Penerbit : Andi. Yogyakarta

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Penerbit : Ghalia Indonesia. Bogor

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pramudita, Anesa. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah, Value For Money dan Sistem pengendalian intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Puspitawati, L. 2016. *Penerapan Teori Stewardship pada Pengelolaan Keuangan Daerah*. Journal of Accounting Research. Vol. 8 No. 2, Hal 110-122. ISSN: 2655-1748.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.

Sukmawati, F. dan Nurfitriani, A. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan Umkm. Vol. 2 No. 1. Hal. 52-66. ISSN : 2654-5446.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wiharto. 2011. *Transparansi Dalam Pelayanan Publik*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta